



Penguatan Tata Kelola BUMKam Narey melalui Pemutakhiran Data Retribusi dan Sosialisasi di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura

Strengthening BUMKam Narey Governance through Retribution Data Updating and Socialization in Kampung Sereh, Sentani District, Jayapura Regency

Cindy Aprilia^{1*}, Greyfain Imanoeel Pasima², Nindyan Asnita³, Kristina Tabuni⁴, Malin Jikwa⁵, Jessica A. Griapon⁶, Florentina V. Iek⁷, Kesya A. B. Lensru⁸, Alfani Laura HariKedua⁹

^{1,2,4,5,6,7,8,9}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Indonesia

³Universitas Cendrawasih

*Penulis Korespondensi: apriliacindy0704@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 13 Juni 2026;

Revisi: 19 Juli 2026;

Diterima: 15 Agustus 2026;

Terbit: 19 Agustus 2026

Keywords: BUMKam; Clean Water; Participatory DataCollection; Cemetery Fees; Socialization.

Abstract: This community service article reports the results of two integrated community service programs (Kuliah Kerja Nyata) conducted by Student Group 15 of Universitas Cenderawasih in Kampung Sereh, Sentani District, Jayapura Regency: (1) a household data-collection program on public cemetery retribution and clean water services, and (2) a socialization event introducing BUMKam (village-owned enterprise) governance, both centered on BUMKam Narey. Methods included field observation, direct interviews with heads of household, structured data-collection forms, verification with RT/RW leaders, and a participatory outreach event involving village officials, the BUMKam director, and an external resource person. Data were collected from 92 households. Results show that only 24% of households had recorded cemetery retribution data, with recorded amounts ranging widely from IDR 250,000 to IDR 10,000,000; the most frequent amount was IDR 5,000,000 for adults and IDR 2,000,000 for children. For clean water, 24 households used piped municipal water (PAM), 33 paid for village-managed water, 33 used village water without payment, and most households that expressed a tariff preference favored IDR 20,000 per month.

Abstrak

Artikel pengabdian ini melaporkan hasil pelaksanaan dua program kerja terintegrasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kelompok 15 Universitas Cenderawasih di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, yaitu: (1) pendataan retribusi pemakaman umum dan pelayanan air bersih tingkat rumah tangga, dan (2) sosialisasi pengenalan tata kelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), keduanya berpusat pada BUMKam Narey. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara langsung dengan kepala keluarga, pengisian formulir pendataan terstruktur, verifikasi bersama ketua RT/RW, serta kegiatan sosialisasi partisipatif yang melibatkan aparat kampung, Direktur BUMKam, dan narasumber eksternal. Data berhasil dihimpun dari 92 Kepala Keluarga (KK). Hasil menunjukkan bahwa baru 24% KK yang memiliki data besaran retribusi pemakaman, dengan besaran yang tercatat sangat bervariasi antara Rp250.000 hingga Rp10.000.000; besaran yang paling banyak dipilih adalah Rp5.000.000 untuk kategori dewasa dan Rp2.000.000 untuk kategori anak. Untuk air bersih, 24 KK menggunakan air PAM, 33 KK membayar air kampung, 33 KK menggunakan air kampung tanpa membayar, dan mayoritas KK yang menyatakan pilihan tarif memilih besaran Rp20.000,00 per bulan. Kegiatan sosialisasi mengungkap bahwa pengelolaan unit usaha air bersih dan pemakaman oleh BUMKam Narey masih berdasarkan kewenangan lisan, dengan surat resmi yang masih dalam proses pengajuan, serta unit usaha pengolahan buah merah, nanas, sagu, dan pakan ternak yang belum berkembang optimal.

Kata Kunci: Air Bersih; BUMKam; Pendataan Partisipatif; Retribusi Pemakaman; Sosialisasi.

1. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik merupakan salah satu bentuk pengabdian mahasiswa melalui penerapan ilmu pengetahuan untuk membantu penyelesaian permasalahan di tingkat kampung. Salah satu bentuk kegiatan yang umum dilakukan adalah pendataan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan peningkatan pelayanan publik, yang selama ini banyak terkendala oleh keterbatasan sistem administrasi di tingkat lokal (Eldo et al., 2025; Mayasiana et al., 2024).

Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa/Kampung (PADes) yang penting bagi keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat kampung, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kajian pengelolaan pendapatan daerah dan desa (Abdullatif et al., 2025; Yuliana & Ismail, 2023). Namun demikian, pengelolaan retribusi di banyak wilayah masih menghadapi kendala berupa rendahnya pencatatan administratif dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai besaran serta dasar hukum retribusi yang berlaku (Hapsari et al., 2025).

Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, merupakan salah satu kampung yang memiliki Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) bernama BUMKam Narey. BUMKam merupakan padanan istilah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang disesuaikan dengan nomenklatur wilayah administratif di Papua, dengan dua bidang layanan utama yang menjadi fokus retribusi kampung, yaitu pemakaman umum dan penyediaan air bersih. Observasi awal menemukan bahwa data mengenai besaran retribusi pemakaman dan status pembayaran air bersih pada tingkat rumah tangga belum terhimpun secara sistematis, sementara pemahaman masyarakat mengenai konsep dan pengelolaan BUMKam secara umum juga masih perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat terhadap BUMKam dapat lebih optimal. Kondisi ini konsisten dengan tantangan tata kelola yang umum ditemukan pada Badan Usaha Milik Desa di berbagai wilayah, di mana lemahnya pencatatan administratif dan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi hambatan utama keberlanjutan usaha dan pelayanan (Kelen & Bima, 2023; Panjaitan & Hutapea, 2024; Saputra & Sofyani, 2023). Aspek pelayanan air bersih memiliki tantangan tersendiri, mengingat besaran tarif yang dapat diterima masyarakat (willingness to pay) sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan sumber air yang tersedia (Garda & Harini, 2018). Berbagai kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan penentuan tarif air berbasis data riil kebutuhan dan kemampuan bayar masyarakat penting dilakukan agar pengelolaan air bersih pedesaan dapat berkelanjutan secara finansial (Barid et al., 2025). Demikian pula pada aspek retribusi pemakaman, penguatan tata kelola pembiayaan dan administrasi menjadi kebutuhan yang berulang kali ditemukan pada

pengabdian masyarakat terkait pengelolaan pemakaman umum (Pasmadi et al., 2025). Selain aspek pendataan, penguatan pemahaman masyarakat mengenai tata kelola BUMDes/BUMKam melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga terbukti berperan penting dalam mendorong partisipasi dan keberlanjutan usaha desa (Moita, 2022; Susanto & Winarto, 2022). Payung hukum yang jelas bagi pengelolaan unit usaha BUMDes juga menjadi faktor krusial, mengingat implementasi peraturan perundang-undangan yang konsisten dapat memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pengelolaan usaha desa (Yarni et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, Mahasiswa KKN Kelompok 15 Universitas Cenderawasih menyusun dua program kerja utama yang saling melengkapi, yaitu: (1) pendataan besaran retribusi pemakaman umum dan kondisi pelayanan air bersih pada tingkat rumah tangga di Kampung Sereh; dan (2) kegiatan sosialisasi bertajuk "Memperkenalkan BUMKam: Potensi Ekonomi untuk Kemajuan Kampung" pada BUMKam Narey, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengurus mengenai konsep, manfaat, dan tata kelola BUMKam. Artikel ini disusun untuk mendokumentasikan proses dan hasil kedua program kerja tersebut, sekaligus memberikan kontribusi akademik pada literatur pengabdian masyarakat mengenai penguatan basis data dan tata kelola kelembagaan BUMKam di wilayah Papua.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai bagian dari rangkaian KKN Tematik yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 1 Agustus 2026. Program pendataan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 16 Juli 2026 dengan sasaran Kepala Keluarga (KK) pada beberapa RT/RW di wilayah Kampung Sereh, dengan jumlah 92 KK yang berhasil didata. Program sosialisasi BUMKam dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Juli 2026, pukul 10.00 WIT, bertempat di Balai Posyandu Othauw, Kampung Sereh, dengan sasaran Kepala Pemerintahan Kampung, Sekretaris Kampung, Direktur BUMKam, aparat kampung, dan masyarakat umum.

Metode Pendataan

Metode pendataan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan Kepala Kampung, Ketua BUMKam Narey, ketua RT/RW, dan warga secara langsung, sejalan dengan model partisipatif mahasiswa KKN dalam pendataan kependudukan yang telah terbukti efektif memperkuat basis data desa di berbagai lokasi pengabdian (Astiko et al., 2026; Pratiwi et al., 2026). Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara langsung dengan kepala keluarga, pengisian formulir pendataan terstruktur secara door-to-door, serta verifikasi

data bersama ketua RT atau aparat kampung (Sugiyono, 2013). Tahapan pelaksanaan pendataan mengikuti alur sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

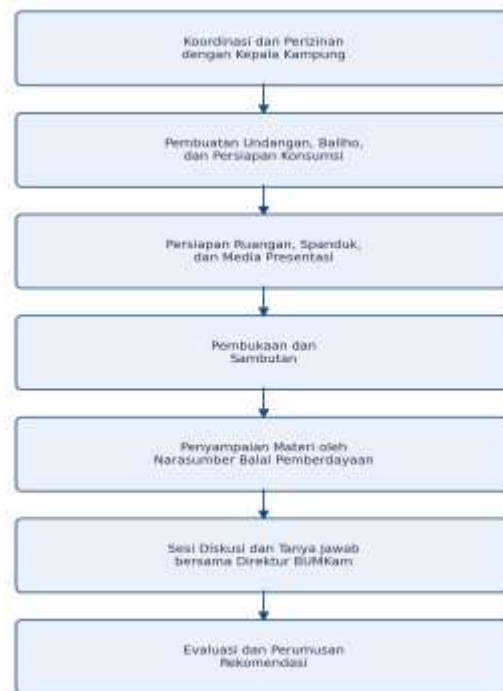


Gambar 1. Tahapan Metode Pelaksanaan Pendataan.

Data yang terhimpun kemudian direkapitulasi dan dianalisis secara deskriptif-kuantitatif untuk melihat distribusi besaran retribusi pemakaman per kategori (anak dan dewasa, asli dan pendatang), serta distribusi status sumber air dan pilihan besaran tarif retribusi air bersih yang dianggap sesuai oleh warga.

Metode Sosialisasi BUMKam

Kegiatan sosialisasi menggunakan metode penyuluhan partisipatif yang terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, sejalan dengan praktik pelatihan penguatan tata kelola BUMDes berbasis potensi masyarakat yang umum diterapkan pada pengabdian sejenis (Moita, 2022). Tahap persiapan meliputi koordinasi dan perizinan dengan Kepala Kampung, pembuatan undangan dan baliho kegiatan, penyiapan konsumsi, serta pengaturan ruangan dan media presentasi. Tahap pelaksanaan meliputi pembukaan dan sambutan, penyampaian materi oleh narasumber dari Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal mengenai landasan hukum desa, pengertian, dasar hukum pembentukan, dan pengelolaan BUMDes/BUMKam, serta sesi diskusi bersama Direktur BUMKam dan Sekretaris Kampung. Tahap evaluasi dilakukan melalui perumusan rekomendasi berdasarkan hasil diskusi dan masukan peserta. Tahapan pelaksanaan sosialisasi disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan Metode Pelaksanaan Sosialisasi BUMKam.

3. HASIL

Retribusi Pemakaman Umum

Dari 92 KK yang terdata, sebanyak 22 KK ($\pm 24\%$) memiliki data besaran retribusi pemakaman, sedangkan 70 KK ($\pm 76\%$) lainnya belum memiliki data tersebut. Data yang kosong bukan berarti retribusi tidak dikenakan biaya, melainkan disebabkan oleh warga yang belum mengetahui besaran retribusi yang berlaku, atau merasa bukan pihak yang berhak menentukan besaran tersebut. Dari 22 KK yang telah memiliki data, sebarannya cukup merata pada tiap kategori: Anak Asli (15 KK), Anak Pendatang (16 KK), Dewasa Asli (17 KK), dan Dewasa Pendatang (16 KK). Kondisi keterbatasan pencatatan ini sejalan dengan tantangan administrasi retribusi yang umum ditemukan pada pengelolaan pendapatan asli desa di berbagai wilayah (Abdullatif et al., 2025; Hapsari et al., 2025).

Tabel 1. Distribusi Besaran Retribusi Pemakaman Kategori Anak (Asli dan Pendatang).

Besaran Tarif Retribusi	Jumlah KK - Asli	Jumlah KK - Pendatang
Rp250.000	2 KK	-
Rp330.000	1 KK	1 KK
Rp500.000	-	2 KK
Rp1.000.000	2 KK	-
Rp2.000.000	3 KK	5 KK

Besaran Tarif Retribusi	Jumlah KK - Asli	Jumlah KK - Pendatang
Rp3.000.000	4 KK	2 KK
Rp5.000.000	1 KK	4 KK
Rp5.500.000	1 KK	1 KK
Rp7.000.000	1 KK	-
Rp8.000.000	-	1 KK

Besaran retribusi yang paling banyak dipilih pada kategori Anak adalah Rp2.000.000, dengan 8 kali kemunculan (3 KK Asli, 5 KK Pendatang).

Tabel 2. Distribusi Besaran Retribusi Pemakaman Kategori Dewasa (Asli dan Pendatang).

Besaran Tarif Retribusi	Jumlah KK - Asli	Jumlah KK - Pendatang
Rp250.000	1 KK	-
Rp500.000	1 KK	1 KK
Rp750.000	-	1 KK
Rp1.000.000	1 KK	-
Rp1.500.000	1 KK	-
Rp2.000.000	-	1 KK
Rp3.000.000	3 KK	2 KK
Rp4.000.000	1 KK	1 KK
Rp5.000.000	4 KK	7 KK
Rp5.500.000	1 KK	1 KK
Rp7.000.000	3 KK	1 KK
Rp8.000.000	-	1 KK
Rp10.000.000	1 KK	-

Besaran retribusi yang paling banyak dipilih pada kategori Dewasa adalah Rp5.000.000, dengan 11 kali kemunculan (4 KK Asli, 7 KK Pendatang). Rentang nilai yang cukup lebar pada kedua kategori mengindikasikan belum adanya keseragaman penerapan besaran retribusi pemakaman di lapangan.

Pelayanan Air Bersih

Dari 92 KK yang terdata, sebanyak 24 KK menggunakan air PAM, 33 KK membayar untuk air kampung, 33 KK menggunakan air kampung tanpa membayar, dan 2 KK menggunakan sumber air lain (air sendiri/air kali). Selain status sumber air, pendataan juga mencatat pilihan harga yang disetujui warga apabila dikenakan retribusi air bersih, dengan tiga pilihan besaran: Rp15.000,00, Rp20.000,00, dan Rp50.000,00. Dari 92 KK, sebanyak 56 KK telah menyatakan pilihan harga, sedangkan 36 KK lainnya belum/tidak memilih salah satu dari ketiga besaran tersebut. Pola preferensi tarif seperti ini konsisten dengan temuan kajian kesediaan membayar (*willingness to pay*) untuk layanan air bersih pedesaan, yang

menunjukkan bahwa besaran tarif yang dapat diterima warga sangat bergantung pada kondisi sosial-ekonomi setempat (Garda & Harini, 2018).

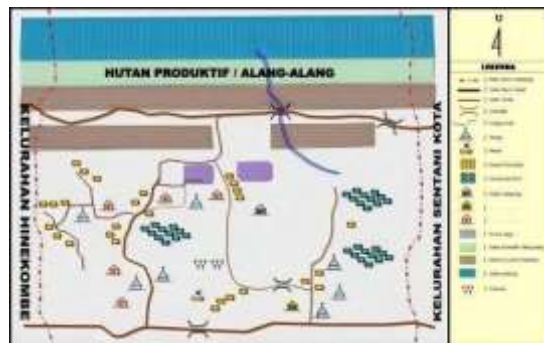
Tabel 3. Pilihan Harga Retribusi Air Bersih.

Pilihan Harga	Jumlah KK
Rp15.000,00	17 KK
Rp20.000,00	30 KK
Rp50.000,00	9 KK

Tabel 4. Status Sumber dan Pembayaran Air

Status	Jumlah KK
PAM	24 KK
Bayar (Kampung)	33 KK
Tidak Bayar (Kampung)	33 KK
Sumber Air Lain (Air Sendiri/Air Kali)	2 KK

Pilihan harga yang paling banyak dipilih adalah Rp20.000,00 dengan 30 KK, diikuti Rp15.000,00 (17 KK) dan Rp50.000,00 (9 KK), menandakan besaran ini paling banyak dianggap sesuai oleh warga. Sementara itu, status sumber air masih bervariasi antara PAM, air kampung berbayar, air kampung tanpa bayar, dan sumber air lain, sehingga kebijakan retribusi air bersih perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi tersebut di tiap wilayah, sebagaimana juga ditemukan pada pendampingan penentuan tarif air bersih berbasis SPAMDes di berbagai lokasi pengabdian (Barid et al., 2025).



Gambar 3. Sketsa Peta Wilayah Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

Sosialisasi BUMKam "Memperkenalkan BUMKam: Potensi Ekonomi untuk Kemajuan Kampung"

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Juli 2026, di Balai Posyandu Othauw, Kampung Sereh, dan dihadiri oleh Kepala Pemerintahan Kampung (diwakili Sekretaris Kampung), Direktur BUMKam, aparat kampung, tokoh masyarakat, narasumber dari Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Dosen

Pendamping Lapangan, dan mahasiswa KKN. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan, dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai landasan hukum desa, pengertian BUMDes/BUMKam, dasar hukum pembentukan, dan pengelolaan BUMDes oleh narasumber, serta sesi diskusi bersama Direktur BUMKam dan Sekretaris Kampung.

Sesi diskusi mengungkap beberapa temuan penting. Pertama, pengelolaan unit usaha air bersih dan retribusi pemakaman oleh BUMKam Narey hingga saat ini masih berjalan berdasarkan kewenangan secara lisan; pihak BUMKam telah mengajukan permohonan surat resmi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan kedua unit tersebut, namun surat itu belum diterbitkan. Kedua, Kampung Sereh memiliki beberapa unit usaha lain yang berpotensi dikembangkan, yaitu pengolahan buah merah, nanas, sagu, dan pakan ternak, namun unit usaha pakan ternak yang telah memiliki mesin belum dapat beroperasi karena kendala biaya operasional dan ketersediaan bahan baku. Ketiga, pengembangan potensi tersebut masih menghadapi kendala dukungan dari seluruh pihak terkait. Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, terlihat dari aktifnya keterlibatan dalam sesi diskusi bersama narasumber dan pengurus BUMKam. Kondisi kesenjangan legalitas semacam ini konsisten dengan temuan berbagai kajian pengabdian yang menekankan pentingnya payung hukum yang jelas dan konsisten untuk memperkuat legitimasi pengelolaan unit usaha BUMDes/BUMKam (Yarni et al., 2024), sementara keterbatasan pengembangan unit usaha turut sejalan dengan tantangan keterbatasan sumber daya dan dukungan kelembagaan yang umum ditemukan pada BUMDes di berbagai wilayah (Kelen & Bima, 2023; Panjaitan & Hutapea, 2024).

4. DISKUSI

Hasil pendataan terhadap 92 KK di Kampung Sereh menunjukkan bahwa kesenjangan data pada kedua aspek, retribusi pemakaman dan air bersih, lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan informasi di tingkat warga dibandingkan ketiadaan kebijakan retribusi itu sendiri. Pada retribusi pemakaman, baru 24% KK yang memiliki data besaran retribusi, dengan variasi nilai yang sangat lebar (Rp250.000 hingga Rp10.000.000). Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai kajian pengelolaan pendapatan asli desa/daerah, yang menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi retribusi menjadi salah satu faktor utama tidak optimalnya penerimaan retribusi (Abdullatif et al., 2025; Yuliana & Ismail, 2023).

Pada aspek air bersih, keberagaman status sumber air (PAM, air kampung berbayar, air kampung tanpa bayar, dan sumber lain) serta variasi pilihan tarif menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tarif tunggal berpotensi kurang sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Preferensi mayoritas warga pada besaran Rp20.000,00 dapat menjadi acuan awal, namun perlu

dikonfirmasi lebih lanjut melalui pendekatan kesediaan membayar (*willingness to pay*) yang mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi rumah tangga, sebagaimana ditunjukkan pada kajian tarif air di wilayah lain (Garda & Harini, 2018; Sandhyavitri, 2016).

Temuan ini memperkuat pentingnya penguatan basis data sebagai fondasi tata kelola BUMKam yang akuntabel, sejalan dengan berbagai laporan pengabdian yang menunjukkan bahwa lemahnya pencatatan dan pendataan administratif menjadi hambatan utama keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa/Kampung di berbagai wilayah (Kelen & Bima, 2023; Moita, 2022; Nursalam et al., 2023; Saputra & Sofyani, 2023). Pendekatan pendataan partisipatif yang melibatkan aparat kampung dan ketua RT/RW, sebagaimana diterapkan dalam program ini, juga terbukti efektif pada berbagai konteks pemutakhiran data desa lain (Astiko et al., 2026; Eldo et al., 2025; Mayasiana et al., 2024; Pratiwi et al., 2026). Data hasil pendataan ini memberikan kontribusi nyata bagi Kampung Sereh dan BUMKam Narey, antara lain tersedianya basis data awal mengenai besaran retribusi pemakaman dan kondisi pelayanan air bersih pada tingkat rumah tangga, teridentifikasinya wilayah dan kategori data yang masih perlu dilengkapi, serta tersedianya informasi preferensi tarif air bersih sebagai bahan pertimbangan kebijakan BUMKam ke depan. Penguatan tata kelola administratif berbasis data ini perlu berjalan beriringan dengan sosialisasi kepada masyarakat, sejalan dengan praktik penguatan kapasitas administratif pada BUMDes/BUMKam di berbagai lokasi pengabdian (Sebayang et al., 2024; Susanto & Winarto, 2022; Wardani & Widati, 2024; Yarni et al., 2024).

Temuan dari kegiatan sosialisasi memperlihatkan bahwa kesenjangan data pendataan dan kesenjangan legalitas pengelolaan unit usaha BUMKam merupakan dua sisi dari persoalan tata kelola yang sama, yaitu lemahnya dokumentasi administratif kelembagaan. Ketiadaan surat resmi yang mengatur kewenangan pengelolaan unit usaha air bersih dan pemakaman berpotensi menghambat akuntabilitas dan keberlanjutan usaha, sebagaimana ditekankan pada kajian penguatan tata kelola BUMDesa berbasis implementasi peraturan perundang-undangan (Yarni et al., 2024). Di sisi lain, potensi ekonomi Kampung Sereh yang cukup beragam, seperti pengolahan buah merah, nanas, sagu, dan pakan ternak, menunjukkan peluang pengembangan BUMKam yang lebih luas di luar unit air bersih dan pemakaman, sejalan dengan temuan pengembangan potensi ekonomi desa melalui BUMDes di berbagai wilayah (Panjaitan & Hutapea, 2024). Namun demikian, pengembangan potensi tersebut memerlukan dukungan kelembagaan dan sumber daya yang lebih memadai, termasuk penyelesaian kendala biaya operasional dan bahan baku pada unit usaha pakan ternak. Kedua program kerja ini saling melengkapi: pendataan menyediakan basis data kuantitatif mengenai kepatuhan dan preferensi warga terhadap retribusi, sementara sosialisasi membuka ruang dialog langsung antara

mahasiswa, pengurus BUMKam, aparat kampung, dan narasumber eksternal untuk mengidentifikasi akar persoalan tata kelola yang tidak selalu tampak dari data kuantitatif semata, seperti isu legalitas kewenangan pengelolaan. Kombinasi pendekatan kuantitatif dan partisipatif semacam ini sejalan dengan praktik pengabdian yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif aparat dan masyarakat dalam penguatan tata kelola desa/kampung (Astiko et al., 2026; Moita, 2022; Pratiwi et al., 2026).

5. KESIMPULAN

Kegiatan KKN Tematik Kelompok 15 di Kampung Sereh telah berjalan dengan baik melalui dua program kerja yang saling melengkapi. Program pendataan berhasil menghimpun data dari 92 Kepala Keluarga mengenai retribusi pemakaman dan pelayanan air bersih, dengan hasil menunjukkan bahwa baru 24% KK yang memiliki data besaran retribusi pemakaman dan keberagaman status sumber air serta preferensi tarif, dengan mayoritas warga condong pada besaran Rp20.000,00. Program sosialisasi "Memperkenalkan BUMKam: Potensi Ekonomi untuk Kemajuan Kampung" turut mengungkap bahwa pengelolaan unit usaha air bersih dan pemakaman oleh BUMKam Narey masih berdasarkan kewenangan lisan tanpa payung hukum resmi, serta adanya potensi unit usaha lain (buah merah, nanas, sagu, dan pakan ternak) yang belum berkembang optimal. Data dan temuan tersebut menjadi informasi penting bagi Pemerintah Kampung dan BUMKam Narey dalam menata administrasi, legalitas, pengelolaan retribusi, serta pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai rekomendasi, Pemerintah Kampung dan BUMKam Narey perlu memperbarui data masyarakat secara berkala, segera menerbitkan surat atau dokumen resmi sebagai dasar pengelolaan unit usaha air bersih dan pemakaman, memanfaatkan dan mengembangkan potensi sagu, buah merah, nanas, dan pakan ternak, serta meningkatkan kerja sama antara pemerintah kampung, pengurus BUMKam, dan masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan tata kelola BUMKam sebaiknya terus dilakukan secara berkelanjutan, sementara kendala pendataan seperti warga yang tidak berada di rumah dan data yang belum lengkap dapat diatasi melalui kunjungan ulang dan koordinasi lebih intensif dengan ketua RT/RW dan aparat kampung pada kegiatan lanjutan.

PENGAKUAN

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Alfani Laura Harikedua, M.Si. selaku Dosen Pendamping Lapangan (DPL) atas bimbingan dan arahan sepanjang pelaksanaan kegiatan; kepada Bapak Steven Eluay, S.E. selaku Kepala Pemerintahan Kampung Sereh dan

Bapak Adolof Felle selaku Direktur BUMKam Narey beserta Sekretaris Kampung dan seluruh perangkat kampung yang telah memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan; kepada narasumber dari Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal atas materi sosialisasi yang disampaikan; kepada seluruh tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, dan warga Kampung Sereh yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pendataan maupun sosialisasi; serta kepada Universitas Cenderawasih atas dukungan penyelenggaraan program KKN Tematik ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullatif, F., Tui, F. P. D., & Nani, Y. N. (2025). Pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo (Studi kasus pajak daerah di Kabupaten Gorontalo). *Sosiologi Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(4), 251–258. <https://doi.org/10.37905/sjppm.v2i4.394>
- Astiko, W., Rahmatullah, R., Fajriansyah, K., Alya, B. K. Z., Hanifah, H., Putriani, A., Mujianda, A. P., Fadilah, R., Adni, J., Dewi, K. J. R., & Muhtada, M. A. I. (2026). Model partisipatif mahasiswa KKN dalam pendataan kependudukan sebagai fondasi pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) menuju e-government di Desa Teratak, Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Gema Ngabdi*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.29303/jgn.v8i1.655>
- Barid, B., Rizani, A. A., Ikhsan, J., Lesmana, S. B., Hairani, A., Widodo, W., & Rob, S. M. (2025). Pendampingan perhitungan tarif air bersih SPAMdes Ngudi Tirto Kulon Progo. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(6), 1452–1459.
- Eldo, D., Hannan, I., Isnani, I., Khabibah, A., & Puspitasari, A. (2025). Optimalisasi administrasi kependudukan melalui program pengabdian masyarakat: Studi kasus di Desa Putat, Kecamatan Bulu. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(4), 1–14. <https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4545>
- Garda, G., & Harini, R. (2018). Analisis willingness to pay untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat sebagian Desa Sitimulyo dan Bawuran. *Jurnal Bumi Indonesia*, 7(1), 1–9.
- Hapsari, L. N., Imaningsih, N., & Fadil, C. (2025). Strategi peningkatan kepatuhan pembayaran PBB melalui pembentukan satgas di Kecamatan Tandes. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 265–271.
- Kelen, L. H. S., & Bima, S. A. (2023). Faktor penghambat berkembangnya bisnis dari Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 8(2), 379–391. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v8i2.19990>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik*.
- Mayasiana, N. A., Dwimahendrawan, A., & Rohim, R. (2024). Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dalam mewujudkan smart village. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 5766–5774. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4466>

- Moita, S. (2022). Pelatihan penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis karakter dan potensi masyarakat di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Abdidas*, 3(6), 959–966. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i6.703>
- Nursalam, Selan, D. R. E., Sayrani, L. P., de Rozari, P. E., Djaha, A. S. A., Soares, Y. A., & Ena Mau, A. O. (2023). Pengembangan kapasitas kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Oabikase Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). *JDISTIRA: Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat*, 3(2), 187–195.
- Panjaitan, R. N., & Hutapea, T. (2024). Pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4(1), 17–33. <https://doi.org/10.51622/jispol.v4i1.2381>
- Pasmadi, A. K., Rahmawati, V., & Fitanisa, F. (2025). Pelatihan pengurusan jenazah sebagai upaya peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat Desa Petung. *Education, Language, and Arts: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 125–129. <https://doi.org/10.23960/ela.v4i2.1176>
- Pratiwi, dkk. (2026). Penguatan tata kelola dusun berbasis digital melalui integrasi data KK-SPPT dan peraturan dusun berbasis partisipatif. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 9(1), 228–243.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Sandhyavitri, A. (2016). Analisis kesediaan masyarakat untuk membayar (willingness to pay) biaya pengadaan air bersih (PDAM) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*.
- Saputra, A. G., & Sofyani, H. (2023). Praktik manajemen strategis dan tata kelola BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i1.7>
- Sebayang, S., Yanti, D., Taufik, M., & Syukri, I. (2024). Edukasi penerapan budaya risiko di BUMDes Pematang Serai Kabupaten Langkat. *Abditeknika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 127–132. <https://doi.org/10.31294/abditeknika.v4i2.7282>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Susanto, S., & Winarto, S. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi BUMDes berbasis sosial berkelanjutan. *Jurnal SOLMA*, 11(3), 641–646. <https://doi.org/10.22236/solma.v11i3.974>
- Wardani, D. K., & Widati, L. W. (2024). Penguatan akuntabilitas publik dan kapasitas manajerial pengurus BUMDes melalui pelatihan intensif. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat SINTA*, 8(1), 55–69. <https://doi.org/10.30595/jppm.v8i1.15421>
- Yarni, M., Prasna, A. D., Irwandi, I., Bustanuddin, B., & Erwin, E. (2024). Penguatan tata kelola BUMDes: Implementasi peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(8), 3631–3642. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i8.1526>

Yuliana, M., & Ismail, A. (2023). Analisis efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. *Aliansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 2(3), 107–116.